PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BanHub Kepri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.

Secara normatif, penyusunan LKjIP berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan serta kepada publik. Selain itu, pedoman teknis penyusunan laporan kinerja juga diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan panduan mengenai sistematika, indikator, serta mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, penyusunan LKjIP Tahun 2025 pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19710311 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR GAMBAR			iii
DAFTAR TABEL			iv
IKHTISAR EKSEKUTIF			v
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	1. 1	Latar Belakang	1
	1.2	Gambaran Umun Organisasi	2
	1.3	Isu Strategis	17
	1.4	Sistematika Penulisan	18
BAB II	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**		**19**
	2.1	Rencana Strategis.....	19
	2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	21
	2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
	2.4	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir RPJMD	24
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**		**26**
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	25
	3.2	Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya	31
BAB IV	**PENUTUP**		**36**
	4.1	Kesimpulan	37
	4.2	Permasalahan atau Kendala dalam Pencapain Kinerja.....	37
	4.3	Saran dan Solusi	38
	LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	7-8

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025	12
Tabel	1.2	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan golongan Tahun 2025	13
Tabel	1.3	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025	13
Tabel	1.4	Klasifikasi PTT Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025	13
Tabel	1.5	Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	14
Tabel	1.6	Proporsi Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	15-16
Tabel	1.7	Pemetaan Permasalahan	17
Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	21
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Tahun 2025	22
Tabel	2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2025	23
Tabel	2.4	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir RPJMD	24
Tabel	3.1	Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LKjIP Tahun 2025	24
Tabel	3.2	Perolehan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	27
Tabel	3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025	27
Tabel	3.4	Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	29
Tabel	3.5	Realisasi Fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	30
Tabel	3.6	Akuntabilitas Keuangan Program/ Sasaran Tahun 2025	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Badan Penghubung Daerah pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu "*Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat*", dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, "*Indeks Pelayanan Publik*" sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2025.

Dalam rangka mencapai sasaran yang tersebut di atas pada tahun 2025, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan total pagu anggaran murni sebesar Rp 13.166.296.949,- (tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 13.861.882.473,- (tiga belas milyar delapan ratus enam pulu satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total realisasi anggaran Rp13.101.772.294,- (tiga belas milyar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 94,52% dari pagu anggaran yang ada serta Realisasi Fisik sebesar 100 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 760.110.179,- (tujuh ratus enam puluh juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 5,48% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran pada tahun 2025, dapat terealisasi IKM sebesar 89,03% dari target IKM yang telah ditetapkan sebesar 89%, sehingga persentase pencapaian sebesar 100,03%. Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki target Indikator pencapaian dilevel nasional/internasional mau pun target SPM.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Badan Penghubung Daerah dapat dikatakan telah melaksanakan tugas dan fungsinnya dengan Sangat Baik.

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LAKIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penyusunan LAKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mendorong Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Menumbuhkan profesionalitas kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintah.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Tugas

Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;

5. perumusan program kerja dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
6. penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis di Antar Lembaga;
7. pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;
8. pelaksanaan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
9. pelaksanaan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
10. penyiapan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
11. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
12. pelaksanaan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
13. penghimpunan dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
14. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
15. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
16. penyusunan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
17. penyiapan, Pengkoordinasian serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara:

18. pelaksanaan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
19. pelaksanaan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
20. pelaksanaan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
21. pelaksanaan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
22. penyiapan pembuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;
23. pelaksanaan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
24. pelaksanaan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
25. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
26. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
27. pelaksanaan, penghimpunan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;
28. pelaksanaan, Penghimpunan, Pengolahan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
29. pelaksanaan, kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;

30. pelaksanaan, kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;
31. pelaksanaan, koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;
32. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
33. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
34. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
35. pelaksanaan, fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Penghubung Daerah membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan penyiapan bahan perencanaan dan evaluasi, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Badan Penghubung Daerah;

b) penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
c) penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
d) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e) pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
f) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
g) penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
h) pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah dilingkungan Badan Penghubung Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
i) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
j) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
k) penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa Jabatan Fungsional tertentu mengemban tugas sebagai Sub Koordinator:

• Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

• Pembinaan terhadap Jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.

• Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

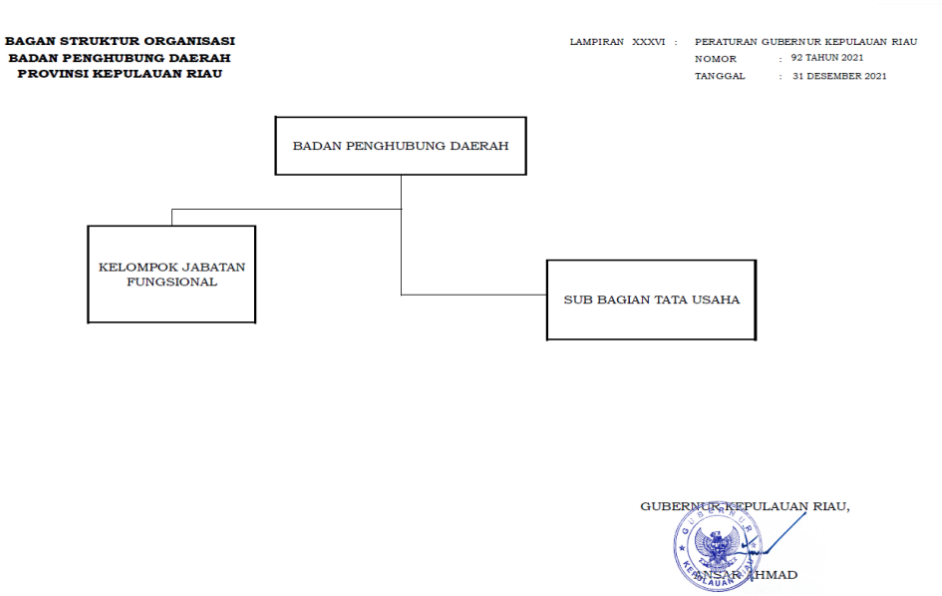
• Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021, Badan Penghubung Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu:

1) Sub Koordinator Antar Lembaga;
2) Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol; dan
3) Sub Koordinator Humas dan Promosi

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1.2.3. Uraian Tugas

- **Sub Koordinator Antar Lembaga**

  Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Antar Lembaga.

  Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai rincian tugas:

  a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Antar Lembaga;
  b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
  c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
  d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
  e) menyusun program kerja dan bahan kebijakan teknis di Sub Koordinator Antar Lembaga;

f) melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;
g) menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
h) melaksanakan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
i) menyiapkan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
j) melaksanakan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
k) melaksanakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
l) menghimpun dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
n) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga; dan
o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol

Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan dan Protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai rincian tugas:

a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;

b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
e) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
f) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
g) menyiapkan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara:
h) melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
i) melaksanakan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler;
k) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler; dan
l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- Sub Koordinator Humas dan Promosi

  Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Humas dan Promosi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai rincian tugas:

a) Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Humas dan promosi;
b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
e) melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
f) melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
g) membuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;
h) melaksanakan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
i) melaksanakan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
j) melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
k) melaksanakan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
l) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;
m) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan

kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;

n) melaksanakan kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;

o) melaksanakan kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;

p) melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;

1.2.4. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 42 orang terdiri dari 18 (delapan belas) Aparatur Sipil Negara (ASN) , 19 (sembilan belas) Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta 5 (lima) Tenaga Harian Lepas (THL).

Table 1.1
Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	10	9	19
2.	PPPK	20	3	23
	JUMLAH	30	12	42

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Table 1.2
Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan golongan Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	3	0	3
2.	Golongan III	6	9	15
3.	Golongan II	1	0	1
	JUMLAH	10	9	19

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Table 1.3
Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Strata 2	4	1	5
2.	Strata 1	4	8	12
3.	Diploma 3	1	0	1
4.	Diploma 1	0	0	0
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1	0	1
	JUMLAH	10	9	19

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Table 1.4
Klasifikasi PPPK Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Strata 2	0	0	0
2.	Strata 1	6	1	7
3.	Diploma 3	0	0	0
4.	Diploma 1	0	0	0
5.	Sekolah Menengah Atas / Sederajat	10	2	12
6.	Sekolah menengah Pertama	4	0	4
	JUMLAH	20	3	23

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

1.2.5. Sumberdaya Aset/Modal

Sumberdaya aset/modal yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagaimana tabel Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai berikut:

Table 1.5
Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kode Lokasi : 31.00.00 - Badan Penghubung Daerah
Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kabupaten/Kota :

Penggolongan dan Kodefikasi Barang					Saldo Awal (Rp.)	Jumlah Total Mutasi Tambah (Rp)	Jumlah Total Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir
Kode Barang				Nama Barang				
1				2	3	4	5	6
1	**3**			**ASET TETAP**	**68.410.849.052,00**	**1.104.108.849,00**	**14.520.000,00**	**69.500.437.901,00**
1	**3**	**1**		**TANAH**	**29.600.000.000,00**	-	-	**29.600.000.000,00**
1	3	1	01	TANAH	29.600.000.000,00	-	-	29.600.000.000,00
1	**3**	**2**		**PERALATAN DAN MESIN**	**18.089.738.609,00**	**1.104.108.849,00**	**14.520.000,00**	**19.179.327.458,00**
1	3	2	01	ALAT BESAR	49.798.470,00	-	-	49.798.470,00
1	3	2	02	ALAT ANGKUTAN	11.085.396.533,00	1.059.690.909,00	-	12.145.087.442,00
1	3	2	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	22.200.000,00	-	-	22.200.000,00
1	3	2	04	ALAT PERTANIAN	121.175.000,00	-	-	121.175.000,00
1	3	2	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.378.454.091,00	18.273.000,00	-	4.396.727.091,00
1	3	2	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	700.095.699,00	2.997.000,00	-	703.092.699,00
1	3	2	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	14.900.000,00	-	-	14.900.000,00
1	3	2	08	ALAT LABORATORIUM	341.308.759,00	-	-	341.308.759,00
1	3	2	09	ALAT PERSENJATAAN	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00
1	3	2	10	KOMPUTER	757.410.057,00	23.147.940,00	14.520.000,00	766.037.997,00
1	3	2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	610.500.000,00	-	-	610.500.000,00
1	**3**	**3**		**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**19.730.034.643,00**	-	-	**19.730.034.643,00**
1	3	3	01	BANGUNAN GEDUNG	18.743.034.643,00	-	-	18.743.034.643,00
1	3	3	02	MONUMEN	987.000.000,00	-	-	987.000.000,00
1	**3**	**4**		**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	**8.415.000,00**	-	-	**8.415.000,00**
1	3	4	01	JALAN DAN JEMBATAN	8.415.000,00	-	-	8.415.000,00
1	**3**	**5**		**ASET TETAP LAIN**	**982.660.800,00**	-	-	**982.660.800,00**
1	3	5	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	925.675.800,00	-	-	925.675.800,00
1	3	5	07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	56.985.000,00	-	-	56.985.000,00

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

1.2.5. Anggaran

Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Murni dengan jumlah pagu sebesar 13.166.296.949,- (tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang selanjutnya pada APBD-P, pagu anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 13.861.882.473,- (tiga belas milyar delapan ratus enam pulu satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Program/ Kegiatan, sebagai berikut:

Table 1.6
Proporsi Anggaran
Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

KODE						Urusan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU RENJA 2025	PAGU APBD 2025	APBD-P 2025
1						2	3	3a	4	5	6	7	12
	5					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
NO	5	7				PENGHUBUNG DAERAH					13.732.895.145	13.634.586.949	13.861.882.473
	5	7	01			BADAN PENGHUBUNG DAERAH					13.732.895.145	13.634.586.949	13.861.882.473
I	5	7	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		89	10.518.903.706	10.402.212.110	10.523.291.664
1	5	7	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	3	401.927.208	401.884.874	229.645.105
1	5	7	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	2	100.000.000	100.000.000	80.881.925
2	5	7	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	201.927.208	201.916.444	89.938.130
3	5	7	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	50.000.000	49.984.650	28.776.960
4	5	7	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	50.000.000	49.983.780	30.048.090
2	5	7	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya	Persentase	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	100	3.957.993.472	3.957.989.022	4.493.191.482
5	5	7	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	19	3.667.513.472	3.667.513.472	4.242.117.162
6	5	7	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	240.480.000	240.480.000	208.868.000
7	5	7	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	50.000.000	49.995.550	42.206.320
3	5	7	04	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	80	56.962.381	56.842.381	51.442.381
8	5	7	04	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	3	46.962.381	46.962.381	46.962.381
9	5	7	04	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	2	10.000.000	9.880.000	4.480.000
4	5	7	05	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Persentase	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	100	428.788.997	312.014.760	422.724.117
10	5	7	05	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	0		27.101.400
11	5	7	05	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	50.000.000	31.616.600	31.616.600
12	5	7	05	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	78.788.997	78.783.300	54.744.500
13	5	7	05	1.06	:08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	50.000.000	49.999.000	45.589.000
14	5	7	05	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	250.000.000	151.615.860	263.672.617
5	5	7	06	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Yang di Adakan	Jumlah	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	3	450.000.000	450.320.900	458.092.901
15	5	7	06	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	450.000.000	450.320.900	458.092.901
16	5	7	06	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	1	0		-
6	5	7	07	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan	Bulan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	3.473.618.139	3.473.546.764	2.681.886.673
17	5	7	07	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	909.766.434	909.695.059	754.324.664
18	5	7	07	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	300.000.000	300.000.000	150.000.000
19	5	7	07	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	2.263.851.705	2.263.851.705	1.777.562.009
7	5	7	08	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	Persentase	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	90	1.749.613.509	1.749.613.409	2.186.309.005
20	5	7	08	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	32	1.249.613.509	1.249.613.509	1.573.935.649
21	5	7	08	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	10	0		
22	5	7	08	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	50	300.000.000	299.999.900	315.749.900
23	5	7	08	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	2	200.000.000	200.000.000	296.623.456
II	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%		88	3.213.991.439	3.232.374.839	3.338.590.809
8	5	7	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					3.213.991.439	3.232.374.839	3.338.590.809
24	5	7	02	1.11	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	1.638.837.812	1.638.837.812	2.075.373.812
25	5	7	02	1.12	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	350.000.000	350.000.000	315.682.000
26	5	7	02	1.13	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	351.927.208	351.927.208	289.464.598
27	5	7	02	1.14	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	DKI. Jakarta, Luar Wilayah	12	873.226.419	891.609.819	658.070.399

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55), Badan Penghubung berdiri sebagai OPD tersendiri. Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, yang dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Table 1.7
Pemetaan Permasalahan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Fungsi Fasilitatif dan Representatif: Kemampuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis, baik dalam urusan kelembagaan, kegiatan kunjungan kerja, maupun diplomasi antarwilayah. b. Promosi Potensi Daerah: Memiliki kapasitas untuk mengangkat produk unggulan, seni budaya, dan kekayaan maritim Kepulauan Riau melalui berbagai kegiatan promosi terpadu. c. Mobilitas dan Konektivitas Layanan: Dukungan terhadap pengelolaan kunjungan, fasilitasi kegiatan, serta logistik antarwilayah menjadi modal penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan. d. Infrastruktur Operasional: Ketersediaan sarana, prasarana, serta dokumen kelembagaan yang lengkap memberi daya dukung kuat bagi pelaksanaan pelayanan lintas daerah. e. Kemitraan dan Jejaring Kerja: Potensi membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah lain, komunitas budaya, serta sektor swasta mendukung kerja sama multi-level yang adaptif dan produktif.	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Badan Penghubung Daerah serta Kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	a. Minimnya integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik b. Belum optimalnya komunikasi lintas OPD terkait isu lingkungan c. Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi untuk edukasi lingkungan	a. Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. b. Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. c. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. d. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota.	a. Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau (Asta Cita 4 RPJMN 2025-2029) b. Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati (Asta Cita 4 RPJMN 2025-2029) c. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan d. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	a. Kesenjangan akses antar pulau b. Mobilitas dan konektivitas lintas daerah c. Isu perbatasan dan diplomasi regional d. Promosi potensi daerah dalam kemitraan nasional	a. Peningkatan koordinasi dan penyebaran informasi untuk pengembangan potensi Provinsi Kepulauan Riau di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta. b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum optimal. c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia/Aparatur belum optimal. d. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengganggaran dan evaluasi belum optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dan gambaran umum organisasi dan isu strategis organisasi serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam upaya pencapaian tujuan pelayanan yang maksimal, serta bentuk informasi hasil pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pembangunan daerah, maka diperlukan dukungan serta komitmen dan upaya yang sinergis instansi pemerintah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah suatu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi, yang didalamnya terdapat rumusan tujuan, sasaran startegis yang akan di capai begitu juga keberhasilan pencapaian indikator.

Untuk mewujudkan kinerja instansi, Badan Penghubung Daerah memerlukan pedoman dan landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya sebagaimana tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 serta Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Program/ kegiatan Tahun 2025, Badan Penghubung Daerah sudah menyusun Renstra yang sebelumnya masih tergabung dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengaplikasikan gambaran tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan indikatif yang di butuhkan untuk mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai kondisi yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

“Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Maju	:	Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah;
Makmur	:	Konsep yang menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kesejahteraan;
Merata	:	Pemerataan pembanguan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara mereta di seluruh wilayah.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke- 4 (empat), yaitu:

“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan“, Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang erbasis digital”

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi adalah: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif , dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah terbagi dalam 2 (dua) tujuan dan sasaran, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah											
- Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,26	4,30	4,33	4,37	4,40	4,44	4,47	
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Pelayanan Publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Hasil Pelayanan Penghubung (%)	0	79,07	79,41	79,76	80,27	80,61	80,95	

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instransi pemerintah sesuai dengan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang- kurangnya adalah indikator keluaran (output). Berikut IKU Badan Penghubung Daerah tahun 2025:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah							
- Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Pelayanan Publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau			Persentase Hasil Pelayanan Penghubung (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.07.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.07.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daeran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.07.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya perlengkapan kantor dan unsur pendukung lainnya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.07.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Belanja Aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Bangunan dan Gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Penghubung Daerah telah membuat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah dengan Gubernur Kepulauan Riau.

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	89 %	89,03%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10.402.212.110,-	APBD
2.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 3.232.374.839,-	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	10.402.212.110,-	APBD-P
2	Program Pelayanan Penghubung	Rp	3.338.590.809,-	APBD-P

Tabel 2.4
Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	89,03%	90%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LKjIP Tahun 2025

No	Skala Capaian Kinerja	Katagori	Interpretasi dan Karakteristik
1	*2*	*3*	*4*
1	> 100 %	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik
2	75% - 100%	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	55% - 74 %	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja,tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar

Pada tahun 2025, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Badan Penghubung Daerah Tahun 2025-2029, yang mana terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

Sasaran Strategis :

'Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata'

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diatas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun tahun 2025, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online (Google Forms) dengan alamat https://forms.gle/y65wKyg6QXYzZcWHA yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara danmasyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dantindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 86 (delapan

puluh enam) orang, namun dalam pelaksanaan survei ini, Badan Penghubung Daerah memperoleh 89 (delapan puluh sembilan) sampel responden, dari Survei ini diperoleh hasil IKM sebesar 89,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perolehan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

UNIT LAYANAN	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan
IKM per unsur	3.543	3.324	3.419	4.000	3.486	3.476	3.648	3.514	3.867
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	89,66 (Sangat Baik)								

Hasil evaluasi dari capaian Indikator Kinerja tersebut diatas adalah bahwa target Indikator Kinerja tersebut diatas dengan target IKM 89, dan dapat terealisasi sebesar 89,06 , sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,06 % atau dalam kategori kinerja Sangat Baik. Hasil ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Badan Penghubung Daerah	89	89,66	100,74

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan Program/ Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
					Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat Pertumbuhan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	89,66	Rp13.861.882.473	Rp13.101.772.294	94,52	efektif

3.2 Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja kebijakan dan strategi Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dan tahun 2025 tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan realisasi kinerja dari tujuan target-target dan Sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan antara realisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2024 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Target, Realisasi, Capaian dengan Tahun Sebelumnya Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani %	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau %	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Renstra Banhub Provinsi Kepri Tahun 2025-2029

E. Realisasi Anggaran

Penggunaan sumber daya keuangan (APBD-P) untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, adalah sebesar Rp. 13.861.882.473,- (tiga belas milyar delapan ratus enam pulu satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp13.101.772.294,- (tiga belas milyar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 94,52 dari pagu anggaran yang ada, sehingga diperoleh sisa anggaran sebesar Rp. 760.110.179,- (tujuh ratus enam puluh juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 5,48% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kemudian, Realisasi Fisik yang dapat dicapai sebesar 100 %, sehingga hasil pelaksanaan program/ kegiatan di Badan Penghubung Daerah memperoleh kategori Sangat Baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran tidak terlepas pelaksanaan 2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

1. 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. 8 (delapan) Kegiatan, yaitu:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3. 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, yaitu:
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   6) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   8) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   12) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

13) Fasilitasi Kunjungan Tamu14) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP

15) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

17) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

20) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

22) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

23) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

24) Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

25) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 didukung dengan anggaran Belanja sebesar Rp. Rp13.101.772.294,- (tiga belas milyar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau.

Secara ringkas komposisi penggunaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 5.07 Badan Penghubung Daerah
Organisasi : 5.07.0.000.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.000.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN		
						(Rp.)	% (Rata-rata)	% (TTB)
5.07	**Badan Penghubung Daerah**	**13.634.586.946,00**	**13.861.882.473,00**			13.101.772.294		
5.07.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.402.212.110,00**	**10.523.291.664,00**			10.080.023.780		
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**401.884.874**	**229.645.105**			209.024.580		
5.07.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	80.881.925	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,58	75.705.451	93,60	0,55
5.07.01.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	201.916.444	89.938.130	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,85	83.151.116	92,45	0,79
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.964.650	28.776.960	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,21	23.572.323	81,91	0,17
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.963.780	30.048.090	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,22	26.595.690	88,51	0,19
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.957.989.022**	**4.493.191.482**			4.377.644.889		
5.07.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.667.513.472	4.242.117.162	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,60	4.136.024.023	97,50	29,84
5.07.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.480.000	208.868.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,51	200.198.000	95,85	1,44
5.07.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.995.550	42.206.320	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,30	41.422.866	98,14	0,30
5.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**56.842.381**	**51.442.381**			13.643.500		
5.07.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.962.381	46.962.381	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0,34	12.043.500	25,64	0,09
5.07.01.1.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.880.000	4.480.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0,03	1.600.000	35,71	0,01
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**312.014.760**	**422.724.117**			410.451.648		
5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		27.101.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,20	26.144.940	96,47	0,19
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.616.600	31.616.600	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	0,30	31.598.000	99,94	0,30
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.783.300	54.744.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,39	54.744.500	100,00	0,39
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.999.000	45.589.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,43	45.585.000	99,99	0,43
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.615.860	263.672.617	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,90	252.379.208	95,72	1,82
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**450.320.900**	**458.092.901**			457.000.000		
5.07.01.1.07.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.320.900	458.092.901	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3,30	457.000.000	99,76	3,30
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.473.546.764**	**2.681.886.673**			2.588.544.068		
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	909.695.059	754.324.664	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5,44	689.910.089	91,46	4,98
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	150.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,08	129.941.090	86,63	0,94
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.263.851.705	1.777.562.009	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,82	1.768.692.889	99,50	12,76
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.749.613.409**	**2.186.309.005**			1.973.715.095		
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendara	1.249.613.509	1.573.935.649	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11,35	1.491.128.486	94,74	10,76
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	299.999.900	315.749.900	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2,28	219.938.728	69,66	1,59
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	296.623.456	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,14	262.647.881	88,55	1,89
5.07.2	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**3.232.374.839**	**3.338.590.809**			3.071.748.514		
5.07.21.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**3.232.374.839**	**3.338.590.809**			3.071.748.514		
5.07.21.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.638.837.812	2.075.373.812	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	14,97	1.872.038.252	90,20	13,50
5.07.21.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	350.000.000	315.682.000	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	2,28	313.851.936	99,42	2,26
5.07.21.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	351.927.208	289.464.598	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2,09	270.770.493	93,54	1,95
5.07.21.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	891.609.819	658.070.399	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4,75	615.087.833	93,47	4,44
Total SPD					100	13.101.772.294	88,33	94,88

Tabel 3.5
Realisasi Fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 5.07 Badan Penghubung Daerah
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN		
						REALISASI	REALISASI FISIK	
						(Rp.)	% (Rata-rata)	% (TTB)
5.07	**Badan Penghubung Daerah**	**13.634.586.949,00**	**13.861.882.473,00**			13.101.772.294		
5.07.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.402.212.110,00**	**10.523.291.664,00**			10.080.023.760		
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**401.884.874**	**229.645.105**			209.024.580		
5.07.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	80.881.925	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,58	75.705.451	100	0,58
5.07.01.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	201.916.444	89.938.130	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,85	83.151.116	100	0,85
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.984.650	28.776.960	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,21	23.572.323	100	0,21
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.983.780	30.048.090	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,22	26.586.690	100	0,22
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.957.989.022**	**4.493.191.482**			4.377.644.889		
5.07.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.667.513.472	4.242.117.162	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,60	4.136.024.023	100	30,60
5.07.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.480.000	208.868.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,51	200.198.000	100	1,51
5.07.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.995.550	42.206.320	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,30	41.422.866	100	0,30
5.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**56.842.381**	**51.442.381**			13.643.500		
5.07.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.962.381	46.962.381	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0,34	12.043.500	100	0,34
5.07.01.1.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.880.000	4.480.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0,03	1.600.000	75	0,02
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**312.014.760**	**422.724.117**			410.451.648		
5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		27.101.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,20	26.144.940	100	0,20
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.616.600	31.616.600	Jumlah Paket Peralatan RumahTanggayang Disediakan	0,30	31.598.000	100	0,30
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.783.300	54.744.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,39	54.744.500	100	0,39
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.999.000	45.589.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,43	45.585.000	100	0,43
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.615.860	263.672.617	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,90	252.379.208	100	1,90
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**450.320.900**	**458.092.901**			457.000.000		
5.07.01.1.07.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.320.900	458.092.901	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3,30	457.000.000	100	3,30
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.473.546.764**	**2.681.886.673**			2.588.544.068		
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	909.695.059	754.324.664	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5,44	689.910.089	100	5,44
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	150.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,08	129.941.090	100	1,08
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.263.851.705	1.777.562.009	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,82	1.768.692.889	100	12,82
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.749.613.409**	**2.186.309.005**			1.973.715.095		
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendara	1.249.613.509	1.573.935.649	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11,35	1.491.128.486	100	11,35
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.999.900	315.749.900	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2,28	219.938.728	100	2,28
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	296.623.456	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,14	262.647.881	100	2,14
5.07.2	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**3.232.374.839**	**3.338.590.809**			3.071.748.514		
5.07.21.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**3.232.374.839**	**3.338.590.809**			3.071.748.514		
5.07.21.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.638.837.812	2.075.373.812	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	14,97	1.872.038.252	100	14,97
5.07.21.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	350.000.000	315.682.000	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	2,28	313.851.936	100	2,28
5.07.21.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	351.927.208	289.464.598	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2,09	270.770.493	100	2,09
5.07.21.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	891.609.819	658.070.399	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4,75	615.087.833	100	4,75
Total BPD					100	13.101.772.294	99	100

BAB IV
P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka Badan Penghubung Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dalam melaksanakan tugasnya Badan Penghubung Daerah dapat dikatakan Baik, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1) Hasil pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar 100.01%;

2) Realisasi Belanja APBD Perubahan Badan Penghubung Daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. Rp13.101.772.294,- atau (94,52%) dari Total APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp Rp13.861.882.473,-, hal ini menunjukan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,13%.

4.2. Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana prasarana Badan Penghubung Daerah yang memadai;
2. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan;
3. Belum optimalnya kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah;
4. Belum optimalnya kegiatan pembinaan masyarakat Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya di luar Provinsi Kepulauan Riau;
5. Belum optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.3. Saran dan Solusi

Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta pemeliharaan secara optimal, sehingga terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Melakukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan kemampuan SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah, baik melalui Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII ataupun berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya baik Pemerintah maupun Non Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta pemanfaatan website dan media sosial lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Paguyuban Masyarakat/ Mahasiswa Kepulauan Riau yang berdomisili di luar Provinsi Kepulauan Riau melalui sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat/ Mahasiswa Perantau asal Kepulauan Riau;
5. Dalam pelaksanaan program/ kegiatan perlu disusun perencanaan secara akurat, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-1 :
FOTO DOKUMENTASI DAN OUTPUT SUB KEGIATAN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(JANUARI – DESEMBER 2025)

Program: Pelayanan Penghubung
Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
a. Sub Kegiatan : Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-, yang digunakan untuk keperluan

Belanja:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara.
- Belanja Perjalanan Dinas













b. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 351.927.208,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik,
- Belanja Natura dan Pakan-Natura.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Belanja Perjalanan Dinas






c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 891.609.819,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Natura dan Pakan-Natura;
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Belanja Perjalanan Dinas


GUBERNUR JAWA TENGAH
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU





d. Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.638.837.812,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja Bahan-Bahan Baku
- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- Belanja Natura dan Pakan-Natura
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
- Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Belanja Perjalanan Dinas












LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKjIP**

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BanHub Kepri

Jl. Taman Bendungan Jatiluhur II No. 21-22
Kelurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210
Tel. 021 25195836 (Hunting)
web. banhub.kepriprov.go.id
email. banhub@kepriprov.go.id